

BAB 1

PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang gambaran tugas akhir yang akan diteliti, meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan masalah, manfaat penelitian dan kerangka penelitian. Melalui uraian tersebut, diharapkan dapat memberi pemahaman atas gambaran permasalahan dan solusi mengenai penelitian kepada pembaca.

1.1 Latar belakang

Dalam menjalankan tugasnya, pemerintah memiliki peran penting yaitu menjadi salah satu pelaku strategis dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah berperan dalam menjalankan fungsi pelayanan, distribusi, pengawasan, dan pemberdayaan masyarakat. Fungsi pemerintah dikatakan optimal apabila tercapainya suatu keadilan dan pemerataan di dalam masyarakat. Namun, pada kenyataannya untuk menjalankan urusan pemerintahan sehari-hari, sistem birokrasi masih menyebabkan jalannya pemerintahan dan layanan publik tidak efektif dan efisien (Zumrotul, 2014).

Tidak mudah untuk membentuk lembaga pemerintah yang profesional, efektif dan efisien. Pasalnya, masing-masing instansi pemerintah tersebut memiliki kepentingan dan kebutuhan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia telah melakukan reformasi birokrasi, salah satunya adalah penyiapan pelaksanaan proses bisnis di instansi pemerintah. Pemodelan proses bisnis dapat dijadikan acuan perangkat pemerintahan untuk mendeskripsikan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi agar sesuai dengan visi, misi, dan tujuan organisasi (Permenpan RB RI, 2018). Selain peta proses bisnis, Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah (SOP-AP) juga harus dirumuskan di setiap kegiatan tata kelola instansi pemerintah sebagai standarisasi cara perangkat menyelesaikan pekerjaannya. Sesuai kebijakan yang berlaku, SOP-AP merupakan prosedur operasi standar untuk pengelolaan administrasi pemerintahan (Permenpan RB RI, 2012).

Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Pasangkayu (Disbunak Kabupaten Pasangkayu) merupakan perangkat daerah yang bertugas mewujudkan peningkatan infrastruktur perkebunan dan peternakan, mengembangkan teknologi perkebunan dan peternakan tepat guna, meningkatkan akses petani terhadap sarana produksi pertanian dan permodalan, menguatkan kelembagaan pertanian, pengembangan manajemen usaha tani dan sistem pemasaran, peningkatan kegiatan pasca panen dan pengolahan hasil, dan pengembangan jaringan kemitraan dengan berbagai *stakeholder*. Tujuan dari dinas ini adalah meningkatkan iklim usaha perkebunan dan peternakan yang kondusif, meningkatkan pengembangan teknologi dan meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam pengendalian hama penyakit, meningkatkan usaha melalui peningkatan sumber daya manusia (SDM), meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat di bidang perkebunan dan peternakan meliputi pengembangan pembinaan usaha perbenihan dan peningkatan produksi, tata guna dan pengolahan hasil perkebunan dan peternakan, pengembangan sumber daya manusia, kelembagaan usaha tani dan introduksi teknologi perkebunan dan perlindungan tanaman (Dinas Perkebunan dan Peternakan Kab. Pasangkayu, 2016).

Untuk mencapai visi, misi, dan tujuan di Disbunak Kabupaten Pasangkayu terdapat program-program dan sasaran kegiatan yang dapat mendorong perkembangan perkebunan dan peternakan di Kabupaten Pasangkayu. Berdasarkan wawancara dengan kepala Disbunak Kabupaten Pasangkayu merupakan instansi yang berdiri sejak tahun 2018 dan sebelumnya bergabung dengan Dinas Pertanian. Oleh karena itu Disbunak Kabupaten Pasangkayu merupakan dinas yang masih baru dan hal tersebut menyebabkan Disbunak Kabupaten Pasangkayu belum memiliki pemodelan proses bisnis dan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang menjadi acuan dan standar pelaksanaan kegiatan. Selain hal tersebut, pada Disbunak Kabupaten Pasangkayu masih kekurangan SDM untuk melakukan penyusunan proses bisnis dan SOP. Karena tidak adanya pemodelan proses bisnis dan penyusunan SOP sehingga ditemukan beberapa permasalahan pada

pelaksanaan kegiatan di Disbunak Kabupaten Pasangkayu, salah satunya adalah kegiatan pengajuan bantuan bibit tanaman dan hewan. Berdasarkan hasil wawancara, proses pengajuan bantuan memerlukan waktu yang cukup lama dalam penyelesaiannya dikarenakan adanya pengulangan proses kegiatan dan adanya proses yang terlewatkan pada saat pelaksanaannya. Hal ini disebabkan karena tidak adanya representasi model proses yang digunakan sebagai acuan dan standar dalam melaksanakan kegiatan. Permasalahan ini mengakibatkan banyaknya program dan kegiatan yang sulit terlaksanakan dan terselesaikan dengan baik (Dinas Perkebunan dan Peternakan Kab. Pasangkayu, 2016).

Oleh karena itu, dibutuhkan dokumen peta proses bisnis dan penyusunan SOP yang dapat mendeskripsikan proses bisnis dalam suatu organisasi untuk membantu pencapaian visi, misi, serta tujuan organisasi pada Disbunak Kabupaten Pasangkayu dengan menggunakan Permenpan RB RI Nomor 19 Tahun 2018 sebagai pedoman pemodelan proses bisnis serta Permenpan RB RI Nomor 35 Tahun 2012 sebagai pedoman penyusunan SOP-AP.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, terdapat permasalahan yaitu Disbunak Kabupaten Pasangkayu belum memiliki pemodelan proses bisnis dan penyusunan SOP. Maka, untuk dapat memodelkan proses bisnis dan menyusun SOP diperoleh rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana memodelkan proses bisnis Disbunak Kabupaten Pasangkayu?
2. Bagaimana menyusun SOP Disbunak Kabupaten Pasangkayu?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Memodelkan proses bisnis pada Disbunak Kabupaten Pasangkayu.
2. Menyusun SOP pada Disbunak Kabupaten Pasangkayu.

1.4 Batasan Masalah

Adapun batasan masalah untuk penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Proses bisnis disusun sesuai dengan aturan Permenpan RB RI No.19 Tahun 2018.
2. SOP yang disusun sesuai dengan aturan Permenpan RB RI No.35 Tahun 2012.

1.5 Manfaat Penelitian

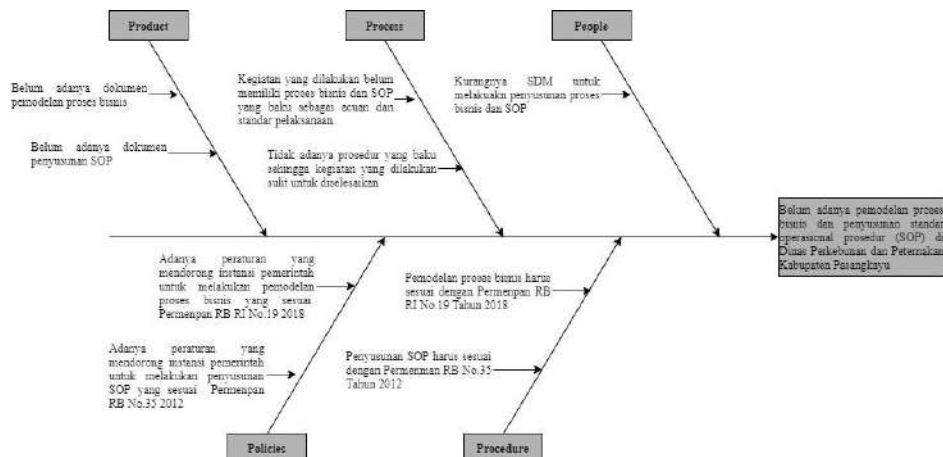
Manfaat yang diperoleh dengan adanya penelitian ini yaitu:

1. Bagi peneliti, dapat menambah wawasan dan pengalaman langsung serta menjadi sarana yang bermanfaat dalam mengimplementasikan pengetahuan penulis tentang pemodelan proses bisnis dan penyusunan SOP.
2. Bagi Disbunak Kabupaten Pasangkayu, pemodelan proses bisnis dan penyusunan SOP dapat menjadi acuan untuk mendeskripsikan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi sehingga menghasilkan kinerja yang sesuai dengan tujuan pembentukan organisasi.

1.6 Kerangka Pemikiran Penelitian

Kerangka penelitian ini dapat dilihat pada diagram *fishbone* di Gambar

- 1.1. Diagram ini menjelaskan sebab dipelukannya pemodelan proses bisnis dan penyusunan SOP pada Disbunak Kabupaten Pasangkayu.



Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran Penelitian

Gambar 1.1 menjelaskan mengenai penyebab dilakukannya penelitian ini. Hal ini dijelaskan menjadi 5 kategori yaitu *product*, *process*, *people*, *policies*, dan *procedure*. Dari kategori *product* dijelaskan bahwa pada Disbuk Kabupaten Pasangkayu belum memiliki pemodelan proses bisnis dan dokumen penyusunan SOP. Dari kategori *process* dijelaskan bahwa kegiatan yang dilakukan belum memiliki pemodelan proses bisnis dan penyusunan SOP yang baku sebagai acuan dan standar pelaksanaan. Oleh karena itu, dibutuhkan waktu yang lama untuk menyelesaikan suatu kegiatan sehingga mengakibatkan banyaknya program dan kegiatan yang sulit terlaksanakan dan terselesaikan. Dari kategori *people* dijelaskan bahwa kurangnya SDM untuk melakukan pemodelan proses bisnis dan penyusunan SOP. Dari kategori *policies* dijelaskan bahwa adanya peraturan yang mendorong instansi pemerintah untuk melakukan pemodelan proses bisnis yang sesuai Permenpan RB RI No. 19 Tahun 2018 dan penyusunan SOP yang sesuai dengan Permenpan RB No.35 Tahun 2012. Dari kategori *procedure* dijelaskan bahwa penyusunan proses bisnis harus sesuai dengan RB RI No. 19 Tahun 2018 dan penyusunan SOP harus sesuai dengan Permenpan RB No.35 Tahun 2012. Oleh karena itu, dari kelima kategori tersebut dapat disimpulkan bahwa Disbuk Kabupaten Pasangkayu membutuhkan pemodelan proses bisnis dan penyusunan SOP dalam setiap melakukan kegiatannya.